



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI SAMSAT PATI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :
SITI ROHMAH
NPM. 211003742018428

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI SAMSAT PATI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
SITI ROHMAH
NPM. 211003742018428

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. SETIYOWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0609096301

Anggota,


Dr. SRI PURWANINGSIH, S.H., M.Hum
NIDN. 0627115801

Anggota,


Dr. PURWANTO, S.H., M.Si
NIDN. 0603046201

Mengetahui,
Dekan,


Prof. Dr. EDY ISLIYONO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum.....	9
1. Pengertian tentang Penegakan Hukum	9
2. Pengertian dan Fungsi Pajak	13
3. Sanksi Perpajakan	15
4. Kedudukan dan Jenis Pajak	18
5. Sistem dan Asas Pemungutan Pajak	22
B. Tinjauan Khusus	25
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	25
2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	26
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	27
4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	28
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	28
6. Dasar Pengenaan Pajak	29
7. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak	30

8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Penegakan hukum dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati	48
C. Kendala dalam penegakan hukum dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati	62
D. Upaya yg di lakukan dalam penegakan hukum terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan aspek penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan kelancaran pendapatan daerah. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan sanksi administrasi, masih terdapat kendala dalam implementasi penegakan hukum terkait pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati, Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yg di lakukan dalam penegakan hukum terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan penelitian secara yuridis normatif. Sumber Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan Penegakan hukum dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati melalui pendekatan preventif dan pendekatan represif. Kendala dalam penegakan hukum terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati yaitu Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, Keterbatasan Akses Layanan, Kurangnya Dukungan Teknologi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengawasan yang Terbatas. Upaya yang di lakukan dalam penegakan hukum terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pati yaitu Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, Peningkatan Akses Layanan, Pengembangan Teknologi dan Sistem Pembayaran, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kolaborasi dengan Pihak Lain

Kata Kunci : penegakan hukum, pajak, kendaraan bermotor,